

# Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota

Krismiayati Tasrin., ST, M.Ec., M.SE.



## PENDAHULUAN

---

Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang cukup berkembang dewasa ini di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada konteks Indonesia, perkembangan ilmu ini sendiri semakin didukung oleh adanya kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Pada dasarnya, munculnya cabang ilmu ini disebabkan oleh adanya beberapa kritik terhadap ilmu ekonomi tradisional yang menafikan dimensi lokasi (*location*) dan ruang (*space*) dalam proses analisisnya.

Oleh karena kelemahan tersebut, maka selanjutnya ilmu ekonomi wilayah dan kota hadir dalam rangka memberikan konsep pemahaman yang lebih bersifat realistik dan operasional. Jadi sesungguhnya ilmu ekonomi wilayah dan kota di sini merupakan suatu cabang ilmu ekonomi tradisional yang mencakup baik aspek mikro dan makro yang mengintegrasikan unsur lokasi dan ruang ke dalam proses analisisnya. Pengintegrasian unsur lokasi dan ruang ini dipandang penting mengingat keduanya dinilai akan dapat mempengaruhi teori dan metodologi analisis dari ilmu ekonomi yang telah ada (Sjafrizal, 2012).

Sebagai sebuah pendahuluan, Modul 1 ini akan menyajikan pembahasan tentang dasar-dasar ilmu ekonomi wilayah dan kota yang secara prinsip berbeda dengan konsep dasar ilmu ekonomi tradisional atau klasik yang tidak memperhitungkan dimensi ruang (*space*) dan lokasi (*location*) di dalam proses analisisnya. Dalam ilmu ekonomi wilayah dan kota, kedua dimensi ini merupakan variabel tambahan yang penting untuk diperhitungkan dalam rangka memberikan gambaran yang lebih realistik terhadap proses analisis ekonomi yang lebih riil. Harapan selanjutnya dari adanya proses analisis

yang riil ini adalah dapat terumuskannya kebijakan-kebijakan penyelesaian persoalan pembangunan wilayah dan kota yang operasional dan yang terpenting adalah harus *solutif*, dalam arti mampu menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya.

Secara lebih rinci, Modul 1 ini akan terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan belajar, yaitu:

1. Sejarah munculnya ilmu ekonomi wilayah dan kota.  
Di sini akan dijelaskan mengenai asal-muasal munculnya ilmu ekonomi wilayah dan kota yang berawal dari berbagai kritik menyoal kelemahan konsepsi ilmu ekonomi tradisional. Bagian ini juga akan membahas tentang urgensi kemunculan ilmu ekonomi wilayah dan kota dalam kaitannya dengan proses analisis dan perumusan kebijakan penyelesaian persoalan yang terjadi pada konteks pembangunan wilayah dan kota.
2. Konsep ruang dan wilayah dalam ilmu ekonomi wilayah dan kota.  
Di sini akan dibahas mengenai konsepsi ruang (*space*) baik dalam arti sempit maupun dalam kaitannya dengan perencanaan wilayah. Dalam rangka memberikan pemahaman lebih diantara kedua konteks tersebut, maka bagian ini juga akan menjelaskan tentang konsep dan definisi wilayah menurut beberapa ahli.
3. Pendekatan dan Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota.  
Bagian ini akan menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam cabang ilmu ini, juga sifat dan sekaligus asumsi-asumsi yang digunakannya. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu memahami kontekstual penggunaan Ilmu Wilayah dan Kota dalam proses analisis.

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

1. Sejarah munculnya ilmu ekonomi wilayah dan kota;
2. Konsep ruang (*space*) dan wilayah dalam ilmu ekonomi wilayah dan kota;
3. Pendekatan dan ruang lingkup ilmu ekonomi wilayah dan kota.

**Selamat Belajar, sukses bagi Anda!**

**KEGIATAN BELAJAR 1****Sejarah Munculnya  
Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota**

Ilmu ekonomi wilayah dan kota, merupakan disiplin ilmu baru yang berkembang cukup pesat pada beberapa dekade belakangan ini. Pada konteks Indonesia, pesatnya perkembangan ilmu ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya direvisi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Hingga kini, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 inipun sedang dalam proses revisi. Berlakunya kebijakan desentralisasi ini membawa konsekuensi adanya pelimpahan kewenangan penanganan fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh sebuah pandangan bahwa pemerintah daerah (*local government*) dinilai lebih memahami tentang kebutuhan (*needs*) dan preferensi (*preference*) masyarakat di daerahnya. Dilihat dari sudut pandang sejarahnya ini berarti peran dan kedudukan pemerintah daerah pasca pemberlakuan kebijakan desentralisasi menjadi cukup strategis sebagai pemeran utama untuk melakukan pembangunan di wilayah yurisdiksinya.

**A. ILMU EKONOMI TRADISIONAL VS ILMU EKONOMI  
WILAYAH DAN KOTA**

Dilihat dari sejarahnya, jauh sebelum ilmu ekonomi wilayah dan kota lahir, terlebih dahulu diperkenalkan ilmu ekonomi tradisional atau klasik oleh Adam Smith pada tahun 1776 melalui bukunya yang berjudul *Wealth of Nation*. Ilmu ekonomi tradisional ini merupakan suatu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari cara-cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang relatif tidak terbatas jumlahnya dengan menggunakan sumberdaya yang relatif terbatas. Dari sini terlihat bahwa masalah ekonomi muncul pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus berhadapan dengan sumberdaya/faktor-faktor produksi yang terbatas. Jadi, kelangkaan adalah persoalan mendasar yang terdapat dalam setiap lapisan masyarakat.

Paul A. Samuelson (1995), mengemukakan bahwa pada dasarnya disiplin ilmu ekonomi tradisional ini berupaya untuk menjawab tiga pertanyaan dasar yang meliputi *what* (apa), *how* (bagaimana), dan *for whom* (untuk siapa). Lebih rinci mengenai ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **What**, yaitu barang dan jasa *apa* yang akan diproduksi dan berapa banyak. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa harus diproduksi dalam perekonomian. Karena sumberdaya (faktor produksi) bersifat terbatas, maka tidak ada perekonomian yang dapat memproduksi barang dan jasa sebanyak yang diinginkan oleh semua anggota masyarakat. Tambahan satu barang atau jasa tertentu biasanya berarti penurunan barang dan jasa lainnya. Oleh karenanya, setiap masyarakat harus memilih secara tepat barang dan jasa mana yang harus diproduksi dan berapa banyak masing-masing diproduksi.
2. **How**, yaitu *bagaimana* dan oleh siapa barang atau jasa diproduksi. Hal ini mengacu pada pilihan kombinasi *input* faktor produksi dan teknik tertentu untuk digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Karena barang dan jasa biasanya dapat diproduksi dengan kombinasi faktor produksi dan teknik yang berbeda, timbul persoalan tentang kombinasi dan teknik mana yang akan digunakan. Selain itu, karena sumberdaya dalam setiap perekonomian bersifat terbatas, maka masyarakat menghadapi persoalan memilih teknik yang memungkinkan biaya produksi terendah untuk memproduksi setiap unit barang dan jasa yang diinginkan. Selain itu, pertanyaan ini juga terkait dengan pilihan teknologi produksi yang akan digunakan, apakah akan menggunakan teknologi padat karya (*labor intensive technology*) atau teknologi padat modal (*capital intensive technology*).
3. **For Whom**, atau *untuk siapa* barang dan jasa tersebut diproduksi. Di sini kita berbicara mengenai persoalan alokasi dan pemasaran hasil produksi. Karena adanya kelangkaan sumberdaya dalam setiap perekonomian, maka tidak ada masyarakat yang dapat memuaskan semua keinginannya.

Dari beberapa masalah pokok tersebut, kemudian manusia dihadapkan pada berbagai pilihan (*alternative choices*) yang memerlukan pertimbangan rasional dalam menentukan tindakan/perilakunya.

Dalam perkembangannya, ilmu ekonomi yang lebih modern juga mencoba menjawab persoalan dasar lain terkait dengan “*when*” atau kapan

sebaiknya suatu barang atau jasa diproduksi. Hal ini disebabkan karena dalam beberapa hal, unsur waktu (*timing*) cukup signifikan pengaruhnya terhadap kebutuhan untuk memproduksi barang dan jasa. Artinya, keputusan untuk memproduksi barang dan jasa saat ini akan mendatangkan keuntungan yang berbeda dari apabila barang dan jasa tersebut diproduksi 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun lagi. Jadi pada dasarnya, baik ilmu ekonomi tradisional maupun modern telah berupaya mencoba menjawab empat (4) pertanyaan dasar tersebut yaitu: ***what, how, for whom dan when.***

Namun demikian, persoalan mendasar lain yang belum terjawab oleh baik ilmu ekonomi tradisional maupun modern ini adalah terkait dengan pertanyaan "***where***", yaitu *dimana* barang dan jasa tersebut diproduksi dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah *mana*. Pertanyaan "***where***" atau *dimana* ini mengacu pada *lokasi* tempat dimana aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara efisien, baik terkait dengan lokasi tempat bahan baku (*raw material*) berasal, lokasi pabrik untuk memproduksi barang maupun lokasi pasar. Aspek *lokasi* ini sendiri selalu dipandang dalam konstelasi ruang (*space*) dan integrasi aspek ini dalam analisis ekonomi dipandang penting mengingat aspek kondisi geografis dan lokasi dalam konstelasi ruang akan sangat menentukan perbedaan harga dari bahan baku, tingkat upah buruh, dan aspek alokasi dan pemasaran hasil produksi. Perbedaan harga pada item-item tersebut selanjutnya akan berdampak pada besar-kecilnya biaya produksi barang dan jasa, yang kemudian akan menentukan tingkat keuntungan (*profit*) yang dapat diperoleh.

Urgensitas mengenai pentingnya mempertimbangkan aspek lokasi (*location*) dan ruang (*space*) inilah yang selanjutnya dijawab oleh disiplin Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota sekaligus menempatkan disiplin ilmu ini pada sudut pandang (*perspective*) yang berbeda dalam kerangka proses analisis ekonomi yang lebih realistis. Dalam konteks pengambilan keputusan, kontribusi ilmu ini dapat dibilang cukup besar mengingat variasi karakteristik daerah yang begitu beragam memang tidak dapat dinafikan dan akan sangat menentukan dalam proses mendekati pilihan keputusan dengan persoalan riil yang ada di lapangan.

Dilihat dari tingkat independensinya, ilmu ekonomi wilayah dan kota dalam beberapa hal dipandang sebagai cabang dari ilmu ekonomi klasik, namun di sisi lain juga dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sjafrizal, (2012), menjelaskan tentang kedudukan (*positioning*) kedua keilmuan ini dengan menjelaskan bahwa suatu ilmu dapat dikatakan sebagai

cabang dari suatu ilmu tertentu bilamana ilmu tersebut dapat memperluas analisisnya dengan menggunakan landasan teori dan konsep dasar yang sama. Sementara, untuk dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, suatu ilmu harus mampu memberikan konsep-konsep teori, metodologi dan analisis empirik yang jelas perbedaannya dengan ilmu lainnya. Namun demikian, apapun sudut pandangnya, ilmu ekonomi wilayah dan kota membawa sudut pandang (*perspective*) yang berbeda dalam kerangka proses analisis ekonomi.

## **B. URGENSI PEMBAHASAN ILMU EKONOMI WILAYAH DAN KOTA**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu ekonomi wilayah dan kota lahir sebagai akibat dari adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh ilmu ekonomi tradisional atau klasik yang menafikan pertanyaan dasar “*where*” atau *dimana* sebaiknya kegiatan ekonomi dilakukan. Oleh karenanya, Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota mencoba mengintegrasikan dimensi lokasi (*location*) dan ruang (*space*) kedalam proses analisis ilmu ekonomi tradisional atau klasik tersebut. Adapun alasan kebutuhan pengintegrasian ini didasarkan atas hal sebagaimana disampaikan oleh Sjafrizal, (2012), yang menyatakan bahwa integrasi ini perlu dilakukan karena lokasi dan struktur ruang dapat mempengaruhi teori dan metodologi analisis ilmu ekonomi yang telah ada.

Di samping itu, kelemahan lain dari ilmu ekonomi tradisional ini adalah terkait dengan asumsi yang digunakannya, dimana ilmu ini menggunakan asumsi bahwa struktur ekonomi wilayah dan perkotaan adalah sama dengan struktur ekonomi nasional. Asumsi ini menjadi sulit diterima mengingat masing-masing wilayah dan perkotaan, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan struktur ekonomi ini tidak saja menyangkut perbedaan karakteristik antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, maupun antara daerah perkotaan satu dengan perkotaan lainnya. Oleh karenanya, menganggap satu dengan yang lain sama adalah bentuk asumsi yang kurang realistis.

Pada konteks Indonesia, asumsi ini semakin terlihat tidak realistis mengingat Indonesia merupakan negara dengan wilayah cukup luas dan potensi geografis, topografis dan demografis yang sangat bervariasi. Oleh karenanya pertimbangan aspek ruang memang sangat penting dalam

kerangka pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis mengingat faktor-faktor kewilayahan beserta dengan karakteristiknya tersebut akan sangat menentukan variasi hasil analisis pada skala ekonomi mikro maupun makro. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek lokasi dan ruang ini akan ikut menentukan ketepatan keputusan ekonomi yang diambil.

Khususnya pada konteks perkotaan, dimana terdapat persoalan keterbatasan sumberdaya, dalam hal ini adalah lahan, maka integrasi aspek lokasi dan ruang dalam proses analisis ekonomi menjadi salah satu prasyarat demi diperolehnya keputusan yang *reliable* (dapat diandalkan) dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Ditambah lagi dengan adanya fenomena perkembangan perkotaan yang semakin pesat dewasa ini, dimana laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, baik dilihat dari laju pertumbuhan *alamiah* karena tingkat kelahiran yang sangat tinggi sementara tingkat kematian rendah, maupun pertumbuhan *non alamiah* yang disebabkan oleh *urbanisasi*, sementara di sisi lain jumlah lahan perkotaan relatif terbatas dan tidak mengalami pertambahan. Fenomena ini jelas mensyaratkan adanya pertimbangan spasial dalam analisis ekonomi agar pilihan-pilihan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah yang riil terjadi di lapangan.

Keunikan karakteristik setiap wilayah dan daerah perkotaan salah satunya dapat dilihat dari komposisi penduduknya. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1, persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk setiap provinsi sangatlah bervariasi. Misalnya untuk provinsi-provinsi di pulau Jawa, rata-rata penduduk tinggal di wilayah perkotaan ketimbang di wilayah pedesaan, dengan persentase penduduk di wilayah perkotaan untuk Jawa Barat (65,69%), Daerah Istimewa Yogyakarta (66,44%), Banten (67,01%) dan DKI Jakarta (100%). Sementara itu, untuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku dan Papua rata-rata penduduk tinggal di wilayah pedesaan, misalnya untuk Sulawesi Tengah, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 24,32%, Sulawesi Selatan (36,66%), Sulawesi Tenggara (27,38%), Maluku (37,13%) dan Papua (25,96%).

**Tabel 1.1**  
Jumlah dan Persentase Penduduk Perkotaan dan Perdesaan  
Per Provinsi di Indonesia

No	Nama Provinsi	Jumlah dan Persentase Penduduk					
		Perkotaan		Perdesaan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aceh	1,263,805	28.12	3,230,605	71.88	4,494,410	100.00
2	Sumatera Utara	6,382,672	49.16	6,599,532	50.84	12,982,204	100.00
3	Sumatera Barat	1,877,822	38.74	2,969,087	61.26	4,846,909	100.00
4	Riau	2,169,529	39.17	3,368,838	60.83	5,538,367	100.00
5	Jambi	948,572	30.68	2,143,693	69.32	3,092,265	100.00
6	Sumatera Selatan	2,666,129	35.79	4,784,265	64.21	7,450,394	100.00
7	Bengkulu	530,981	30.95	1,184,537	69.05	1,715,518	100.00
8	Lampung	1,955,225	25.70	5,653,180	74.30	7,608,405	100.00
9	Kep. Bangka Belitung	602,106	49.22	621,190	50.78	1,223,296	100.00
10	Kepulauan Riau	1,390,787	82.83	288,376	17.17	1,679,163	100.00
11	DKI Jakarta	9,607,787	100.00	0	0.00	9,607,787	100.00
12	Jawa Barat	28,282,915	65.69	14,770,817	34.31	43,053,732	100.00
13	Jawa Tengah	14,805,038	45.72	17,577,619	54.28	32,382,657	100.00
14	DI Yogyakarta	2,297,261	66.44	1,160,230	33.56	3,457,491	100.00
15	Jawa Timur	17,832,733	47.58	19,644,024	52.42	37,476,757	100.00
16	Banten	7,124,120	67.01	3,508,046	32.99	10,632,166	100.00
17	Bali	2,342,579	60.21	1,548,178	39.79	3,890,757	100.00
18	Nusa Tenggara Barat	1,877,830	41.73	2,622,382	58.27	4,500,212	100.00
19	Nusa Tenggara Timur	905,943	19.34	3,777,884	80.66	4,683,827	100.00
20	Kalimantan Barat	1,328,185	30.21	3,067,798	69.79	4,395,983	100.00
21	Kalimantan Tengah	740,256	33.46	1,471,833	66.54	2,212,089	100.00
22	Kalimantan Selatan	1,525,125	42.05	2,101,491	57.95	3,626,616	100.00
23	Kalimantan Timur	2,205,725	62.08	1,347,418	37.92	3,553,143	100.00
24	Sulawesi Utara	1,026,584	45.21	1,244,012	54.79	2,270,596	100.00
25	Sulawesi Tengah	640,948	24.32	1,994,061	75.68	2,635,009	100.00
26	Sulawesi Selatan	2,945,429	36.66	5,089,347	63.34	8,034,776	100.00
27	Sulawesi Tenggara	611,373	27.38	1,621,213	72.62	2,232,586	100.00
28	Gorontalo	353,681	34.00	686,483	66.00	1,040,164	100.00
29	Sulawesi Barat	265,088	22.88	893,563	77.12	1,158,651	100.00
30	Maluku	569,395	37.13	964,111	62.87	1,533,506	100.00
31	Maluku Utara	281,241	27.09	756,846	72.91	1,038,087	100.00
32	Papua Barat	227,763	29.95	532,659	70.05	760,422	100.00
33	Papua	735,629	25.96	2,097,752	74.04	2,833,381	100.00
	<b>Indonesia</b>	<b>118,320,256</b>	<b>49.79</b>	<b>119,321,070</b>	<b>50.21</b>	<b>237,641,326</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia



Penjelasan mengenai komposisi penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tersebut, dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa persoalan ruang dan lokasi menjadi dimensi yang harus diperhatikan dalam proses analisis sosial ekonomi di suatu wilayah. Dalam situasi demikian, efisiensi penggunaan lahan (*land use*), pengaturan lokasi dan tata ruang akan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Disamping itu, dengan memasukkan unsur lokasi dan struktur ruang ini, analisis ilmu ekonomi akan menjadi lebih kongkret sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang sangat bervariasi.

Dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi dan ruang yang demikian beragam, maka tidak dapat disangkal bahwa kedua aspek ini merupakan prasyarat yang mutlak dalam analisis ekonomi dan perencanaan pembangunan pada tingkat wilayah. Terlebih bagi negara dengan cakupan wilayah yang sangat luas dengan potensi geografis sangat bervariasi, maka pertimbangan aspek lokasi dan ruang menjadi sangat penting. Hal tersebut karena kedua aspek ini akan mempengaruhi besaran keuntungan dan kerugian yang diberikan oleh suatu lokasi yang selanjutnya akan menjadi dasar penentuan keputusan. Hal ini tidak hanya berlaku pada analisis ekonomi mikro tetapi juga pada analisis ekonomi makro yang bersifat agregatif.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan kelemahan Ilmu Ekonomi Tradisional yang kemudian dijawab oleh Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota!
- 2) Jelaskan mengapa unsur lokasi (*location*) dan ruang (*space*) sangat penting dalam analisis Ekonomi Wilayah dan Kota!
- 3) Jelaskan urgensi pembahasan perlunya Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota dalam kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Baca kembali konsepsi Ilmu Ekonomi Tradisional dan kritik yang muncul terhadap cabang ilmu ini. Temukan apa yang kemudian dijawab oleh Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota untuk menghasilkan bentuk analisis yang lebih realistis dan operasional.
- 2) Baca kembali konsepsi lokasi (*location*) dan ruang (*space*) dalam menjawab pertanyaan “**Where**” atau dimana kegiatan produksi barang dan jasa akan dilakukan dan untuk masyarakat daerah mana barang dan jasa tersebut dibuat. Kemudian kaitkan dengan kontekstualnya terhadap struktur ruang wilayah dan perkotaan.
- 3) Apabila Anda kembali membaca petunjuk pada poin 2, maka Anda akan dengan mudah menjawab soal latihan ini.



### RANGKUMAN

---

1. Pada prinsipnya, baik ilmu ekonomi tradisional maupun modern berupaya mencoba menjawab empat (4) pertanyaan dasar yang meliputi: **what** (apa), **how** (bagaimana), **for whom** (untuk siapa) dan **when** (kapan) kegiatan ekonomi dilakukan. Namun demikian, persoalan mendasar lain yang belum terjawab adalah terkait dengan pertanyaan “**where**”, yaitu *dimana* barang dan jasa tersebut diproduksi dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah *mana*.
2. Pertanyaan “**where**” atau *dimana* ini mengacu pada *lokasi* tempat dimana aktifitas ekonomi dapat berlangsung secara efisien, baik terkait dengan lokasi tempat bahan baku (*raw material*) berasal, lokasi pabrik untuk memproduksi barang maupun lokasi pasar. Aspek *lokasi* ini sendiri selalu dipandang dalam konstelasi ruang (*space*) dan integrasi aspek ini dalam analisis ekonomi dipandang penting mengingat aspek kondisi geografis dan lokasi dalam konstelasi ruang akan sangat menentukan perbedaan harga dari bahan baku, tingkat upah buruh, dan aspek alokasi dan pemasaran hasil produksi. Perbedaan harga pada item-item tersebut selanjutnya akan berdampak pada besar kecilnya biaya produksi, yang kemudian akan menentukan tingkat keuntungan (*profit*) yang diperoleh.
3. Urgensi mengenai pentingnya mempertimbangkan aspek lokasi (*location*) dan ruang (*space*) ini kemudian dijawab oleh disiplin ilmu ekonomi wilayah dan kota sekaligus menempatkan disiplin

ilmu ini pada sudut pandang (*perspective*) yang berbeda dalam kerangka proses analisis ekonomi yang lebih realistis. Dalam konteks pengambilan keputusan, kontribusi ilmu ekonomi wilayah dan kota ini dapat dibbilang cukup besar mengingat variasi karakteristik daerah yang begitu beragam memang tidak dapat dinafikan dan akan sangat menentukan dalam proses mendekati pilihan keputusan dengan persoalan riil yang ada di lapangan.



### TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ilmu ekonomi wilayah dan kota merupakan cabang dari ilmu ekonomi tradisional atau klasik. Cabang ilmu ini lahir karena kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh ilmu ekonomi klasik yang gagal untuk menjawab pertanyaan terkait dengan ....
  - A. barang dan jasa apa yang akan diproduksi
  - B. bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut
  - C. kapan barang dan jasa tersebut diproduksi
  - D. dimana barang dan jasa tersebut diproduksi
  
- 2) Pertanyaan “*where*” dalam analisis ekonomi mengarah pada pengertian tentang hal-hal sebagai berikut, *kecuali* ....
  - A. dari mana daerah asal tenaga kerja
  - B. lokasi pabrik untuk memproduksi barang
  - C. lokasi pasar tradisional
  - D. lokasi kantor tempat bekerja
  
- 3) Lokasi (*location*) dan ruang (*space*) merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam analisis ekonomi karena ....
  - A. kegiatan ekonomi dapat dilakukan hanya di satu tempat saja
  - B. lokasi tempat asal bahan baku (*raw material*), lokasi pabrik untuk memproduksi barang serta lokasi pasar harus berada dalam lokasi yang sama.
  - C. pemilihan lokasi yang tepat akan mempengaruhi besaran keuntungan (*profit*) perusahaan
  - D. lokasi tempat asal bahan baku (*raw material*) dan lokasi pabrik sebaiknya berada di luar kota sedangkan lokasi pasar berada di kota.
  
- 4) Ilmu ekonomi wilayah dan kota disebut selangkah lebih maju dari ilmu ekonomi tradisional atau klasik karena ilmu ekonomi wilayah dan kota ....

- A. mampu menjawab pertanyaan “*what*”, “*how*” dan “*for whom*”
  - B. mampu menjawab pertanyaan terkait dengan kapan sebaiknya barang dan jasa diproduksi
  - C. mampu menjawab pertanyaan dimana sebaiknya dan untuk masyarakat di daerah mana barang dan jasa diproduksi
  - D. berkembang lebih pesat dari ilmu ekonomi tradisional
- 5) Ilmu ekonomi wilayah dan kota dinilai memberi sudut pandang (*perspective*) yang berbeda dalam kerangka proses analisis ekonomi yang lebih realistis karena ....
- A. dengan mempertimbangkan faktor lokasi dan ruang, pilihan keputusan yang dibuat dapat lebih mendekati terhadap persoalan riil yang ada di lapangan.
  - B. meskipun telah mempertimbangkan faktor lokasi dan ruang, analisis yang dihasilkan pun masih kurang realistis.
  - C. pada dasarnya faktor lokasi dan ruang tidak ada hubungannya dengan pemecahan permasalahan pembangunan pada konteks wilayah maupun perkotaan.
  - D. proses perencanaan pembangunan wilayah dan kota tidak memerlukan analisis mendalam terkait dengan faktor lokasi maupun ruang.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 2****Konsep Ruang dan Wilayah dalam Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa aspek ruang (*spatial*) dan lokasi (*location*) merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan untuk dapat melakukan analisis ekonomi baik pada konteks wilayah maupun perkotaan. Itulah mengapa disebutkan sebelumnya bahwa dengan mempertimbangkan kedua aspek ini maka proses analisis akan menjadi lebih realitis dan operasional. Terlebih bila kita memperhatikan *positioning* Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan tingkat keberagaman daerah yang sangat tinggi, maka pemahaman mengenai konsep ruang (*space*) dan lokasi (*location*) menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan.

Kegiatan Belajar 2 ini akan fokus membahas tentang konsep ruang dan wilayah secara lebih mendalam dikaitkan dengan konteks wilayah dan perkotaan yang merupakan representasi dari unsur ruang (*space*). Hal ini perlu dipahami mengingat keduanya memiliki implikasi yang berbeda antara satu sama lain dalam analisisnya.

**A. APA YANG DIMAKSUD DENGAN RUANG (*SPACE*)?**

Pada dasarnya, ruang dapat didefinisikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam analogi sederhana, ruang adalah tempat yang dapat digunakan untuk meletakkan suatu benda atau melakukan kegiatan. Kegunaan ruang menjadi terbatas apabila diberi ciri atau karakter tambahan yang sifatnya spesifik. Misalnya, ruang tamu tentunya akan berisi benda atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan menerima tamu. Demikian pula halnya dengan ruang kerja, tentunya juga akan berisi benda atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan bekerja. Di sini jelas terlihat bahwa apabila tidak ada ruang maka suatu benda atau kegiatan tidak mungkin ada di sana. Pemahaman sederhana ini kemudian dipertegas oleh definisi ruang menurut Kamus Random House (Tarigan, 2009), yang menjelaskan bahwa ruang diartikan sebagai tempat berdimensi tiga tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat menampung benda dan kegiatan apa saja.

Berkaitan dengan hal ini, sebenarnya ada tiga kata yang sering dipertukarkan, yaitu *ruang*, *tempat* dan *lokasi*. Di antara ketiga istilah ini, *ruang* mengandung pengertian umum yang tidak terikat dengan isi maupun lokasi. Sementara *tempat* seringkali dikaitkan dengan keberadaan suatu benda/kegiatan yang telah ada/sering ada di situ. Dan *lokasi* diartikan dalam konstelasi ruang yang dikaitkan dengan titik lintang dan bujur dalam tata koordinat bumi. Misalnya, posisi Indonesia adalah terletak pada koordinat  $6^{\circ}$  LU -  $11^{\circ}$  LS dan  $95^{\circ}$  BB -  $141^{\circ}$  BT. Dengan mengetahui titik koordinat tersebut maka akan memudahkan kita untuk mencarinya di dalam peta.

Konsep lokasi sendiri ada 2 (dua) yaitu *lokasi mutlak* dan *lokasi relatif*. *Lokasi mutlak* dilihat berdasarkan lokasi astronomis sebagaimana dijelaskan pada contoh di atas mengenai letak Indonesia. Sedangkan *lokasi relatif* melihat posisi suatu lokasi terikat dengan lokasi lainnya dalam suatu dimensi ruang atau wilayah. Misalnya posisi ibukota Jakarta dapat dikatakan berada di sebelah timur atau sebelah barat atau sebelah selatan tergantung pada posisi saat kita menyebutnya. Jakarta dikatakan berada di sebelah utara saat kita berada di kota Depok, namun akan dikatakan berada di sebelah barat bila kita berada di kota Bekasi.

Sementara itu secara regulasi, yaitu berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang dimaknai sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dari definisi tersebut kemudian dapat kita pahami bahwa ada ruang yang dimaksudkan untuk manusia melakukan kegiatannya dan di sisi lain juga ada ruang untuk kelangsungan hidup makhluk lain yang juga harus dipelihara, dijaga dan bahkan dilindungi agar kehidupannya dapat tetap berlangsung.

Oleh karena pentingnya ruang dalam rangka mewadahi benda-benda maupun aktivitas maka analisis keruangan (*spatial*) perlu dilakukan untuk mempelajari perbedaan lokasi mengenai serangkaian sifat-sifat penting dari ruang. Di sini juga perlu dipelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola penyebaran aktifitas dan bagaimana pola tersebut dapat diubah agar penyebarannya menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan dalam analisis keruangan, yaitu: *pertama*, penyebaran penggunaan ruang yang telah ada; dan *kedua*, penyediaan ruang yang akan digunakan atau dimanfaatkan untuk pelbagai kegunaan yang dirancang untuk kedepan.

Di sini, kerangka kerja analisis pendekatan keruangan bertitik tolak pada permasalahan susunan elemen-elemen pembentuk ruang. Pada prinsipnya, analisis keruangan dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. *What*, struktur ruang itu seperti apa?
2. *Where*, dimana struktur ruang tersebut berada?
3. *When*, kapan struktur ruang tersebut terbentuk seperti itu?
4. *Why*, mengapa struktur ruang terbentuk seperti itu?
5. *How*, bagaimana proses terbentuknya struktur seperti itu?
6. *Who suffers what and who benefits what*, siapa yang menderita atau memperoleh keuntungan dari adanya struktur ruang seperti itu?

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa keruangan didayagunakan sedemikian rupa untuk kepentingan manusia. Prediksi dan antisipasi terhadap adanya dampak positif dan negatif dari keberadaan ruang harus selalu dipikirkan baik untuk kepentingan manusia pada saat sekarang maupun untuk kepentingan masa depan.

Selanjutnya, karena ruang bisa menyangkut apa saja yang membutuhkan tempat, maka harus ada batasan tentang ruang yang ingin dibicarakan. Dalam hal ini yang ingin dibicarakan adalah ruang sebagai wilayah. Di sini, ruang merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Konsep inilah yang tidak ada dalam ilmu ekonomi tradisional atau klasik, sehingga seringkali dikatakan analisis ekonomi berada pada alam tanpa ruang (*spaceless word*). Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu ekonomi tradisional dan modern telah mampu menjelaskan tentang *what* (apa), *how* (bagaimana), *for whom* (untuk siapa), dan *when* (kapan) produksi barang dan jasa sebaiknya dilakukan. Namun demikian, pertanyaan terkait dengan *where* atau dimana aktivitas produksi tersebut dilakukan baru terjawab dalam ilmu ekonomi wilayah dan kota.

## **B. KONSEP DAN DEFINISI WILAYAH**

Di Indonesia, konsep wilayah juga dikenal dengan beberapa nomenklatur seperti: kawasan, daerah, regional, area dan lain-lain yang kadangkala penggunaannya saling dipertukarkan satu sama lain. Hal inilah yang seringkali membingungkan kita, meskipun sebenarnya masing-masing istilah tersebut memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda. Terkait

dengan hal ini, sesungguhnya semua nomenklatur tersebut dapat diistilahkan dalam satu pemahaman sebagai wilayah (*region*).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, suatu wilayah dapat ditentukan dalam ukuran yang luas tetapi dapat pula dalam ukuran yang lebih sempit tergantung dari kerincian dalam mengidentifikasi kesamaan atau keseragamannya. Contoh wilayah yang luas misalnya wilayah Asia Tenggara, wilayah Eropa Timur, wilayah Amerika Utara, wilayah Asia Selatan dan lain-lain. Masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik yang khas, memiliki budaya dan tingkat peradaban yang relatif sama, yang membedakannya dari wilayah lainnya.

Dalam skala yang lebih kecil, ukuran wilayah dapat pula ditentukan. Di pulau Jawa misalnya, memiliki wilayah-wilayah yang dapat dibedakan baik secara fisik maupun sosial budaya masyarakatnya. Secara fisik misalnya ada wilayah geologi Banten, wilayah geologi zona Bandung, dan lain-lain. Sementara secara sosial-budaya kita juga mengenal adanya wilayah Pantura (pantai utara Jawa), wilayah kebudayaan Pasundan, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan lain-lain.

Banyak ahli memberikan batasan mengenai wilayah, namun demikian masing-masing definisi tersebut seringkali berbeda satu sama lain disesuaikan dengan permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi. Sebagai akibatnya, tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Salah satu definisi wilayah yang dikemukakan oleh E.G.R. Taylor pada tahun 1950 adalah sebagai berikut:

*“A region may be defined as a unit area of the earth’s surface distinguishable from a more area by the exhibition of some unifying characteristics of property” (Wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik atau properti yang menyatu).*

Meskipun ada bermacam definisi wilayah, namun pada prinsipnya terdapat kesamaan unsur didalamnya yaitu bahwa masing-masing bagian dari wilayah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, memiliki korelasi atau hubungan keterkaitan yang erat.

Menyoroti konsepsi wilayah berdasarkan tipe, ide dasarnya terletak pada pemahaman bahwa terdapat hubungan yang mendasar dari tingkah laku yang terjalin diantara bagian-bagian pembentuknya, yang bertolak pada konsepsi



homogenitas dan heterogenitas. Dalam konsepsi wilayah homogen (disebut juga *formal, homogeneous, uniform region*), maka hal yang terpenting adalah adanya keseragaman dari faktor-faktor pembentuk yang ada di dalam wilayah tersebut, baik secara sendiri-sendiri (individu) maupun gabungan dari beberapa unsur. Pada konsepsi wilayah homogen, yang penting bukan semata-mata pengenalan mengenai sejauh mana batas-batas terluar dari wilayah tersebut akan tetapi yang terpenting adalah mengenal bagian inti (*core*) nya. Hal ini penting untuk dipahami karena karakter utama suatu wilayah akan terlihat dari bagian intinya. Daerah inti adalah bagian dari suatu wilayah yang mempunyai derajat deferensiasi paling besar dengan wilayah lainnya, sedangkan batas-batas wilayah dalam konsep homogenitas semata-mata merupakan bagian yang mempunyai derajat deferensiasi paling kecil atau nol dengan semata-mata merupakan wilayah tersendiri dengan ciri tersendiri pula.

Konsepsi yang ke dua adalah heterogenitas. Dalam konsep ini tercermin suatu pola interdependensi dan pola interaksi antara subsistem utama ekosistem dengan subsistem utama sosial sistem dan penekanan utamanya menyangkut segi-segi kegiatan manusia. Biasanya sistem yang ada dalam batas-batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat.

Disamping konsepsi homegenitas-heterogenitas tersebut, untuk menentukan batas-batas wilayah (demarkasi wilayah) dapat juga dilakukan dengan penggabungan konsepsi-konsepsi tersebut. Itulah kenapa kemudian muncul klasifikasi wilayah yang disebut dengan wilayah perencanaan atau administrasi. Lebih rinci mengenai konsepsi klasifikasi wilayah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **Wilayah Homogen atau Formal (*Homogeneous Region*)**

Konsepsi wilayah homogen (*homogeneous region*) didasarkan pada pendapat bahwa wilayah-wilayah geografik dapat dikaitkan bersama-sama menjadi satu wilayah tunggal apabila wilayah-wilayah tersebut mempunyai ciri-ciri yang seragam. Kesamaan ciri-ciri ini dapat bersifat *ekonomi*, misalnya struktur produksinya, tingkat pendapatannya, atau pola konsumsinya sama, atau bersifat *geografik*, misalnya topografi atau iklimnya serupa, atau bersifat *sosial politik*, misalnya sikap kesetiaan terhadap suatu partai yang sama. Contoh yang mudah dilihat dari wilayah homogen atau formal misalnya adalah wilayah produksi padi di Pantura, wilayah perkebunan karet di Sumatera Utara, dan sebagainya. Meskipun, wilayah

homogen didefinisikan oleh adanya kesamaan atau keseragaman dalam hal tertentu, namun demikian, sangat dimungkinkan bahwa wilayah-wilayah homogen ini juga akan memiliki perbedaan dalam hal-hal yang lain. Hal inilah yang kemudian menyulitkan dalam hal penentuan batas-batas wilayah (demarkasi wilayah) homogen.

### **Wilayah Nodal atau Fungsional atau Wilayah Berkutub (*Polarized Region*)**

Wilayah nodal pada dasarnya dilandasi oleh adanya faktor ketidakmerataan atau faktor heterogenitas, namun demikian antara bagian satu dengan yang lain saling berhubungan erat secara fungsional. Dengan demikian, struktur dari wilayah nodal tersebut dapat dianalogikan sebagai sebuah sel hidup atau sebuah atom yang memiliki satu inti atau pusat (*core, central, metropolis*) dan wilayah pinggiran (*pheriphery* atau *hinterland*) yang bersifat *komplementer* (saling melengkapi) terhadap intinya. Dalam hal ini, wilayah nodal terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, walaupun secara fungsional saling berkaitan satu sama lain. Pada struktur yang demikian, integrasi fungsional akan lebih merupakan dasar hubungan atau dasar dari kepentingan masyarakat di dalam wilayah semacam itu, daripada merupakan homogenitas semata. Salah satu contoh wilayah nodal adalah wilayah Bandung Raya yang terdiri dari kota Bandung sebagai pusat (inti) dengan Kabupaten Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat wilayah *hinterland* atau pinggirannya yang satu sama lain saling melengkapi secara fungsional.

### **Wilayah Administrasi atau Perencanaan (*Planning Ragion*)**

Di samping wilayah *homogeneous* dan nodal, menurut tipenya wilayah dapat digolongkan ke dalam wilayah administrasi atau wilayah perencanaan. Pembagian menurut kategori tersebut dianggap penting jika kita melihat keterkaitannya dengan persoalan kebijakan dan perencanaan wilayah. Pada dasarnya, wilayah administrasi atau wilayah perencanaan adalah wilayah yang menjadi ajang penerapan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah ini umumnya dibatasi oleh kenyataan bahwa unit wilayahnya berada dalam kesatuan kebijakan atau administrasi. Sebagai contoh adalah wilayah yang tergolong dalam kategori provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan sebagainya. Selain itu, dapat juga pembagian wilayahnya dilakukan menurut

kriteria wilayah yang karena sifat alaminya harus direncanakan secara bersama atau serentak, seperti wilayah DAS (daerah aliran sungai).

Sjafrizal (2012), juga menjelaskan bahwa penggunaan konsep wilayah atau *region* tersebut ditentukan oleh sifat dari analisis ekonomi wilayah dan perkotaan yang dilakukan. Pada konteks makro, klasifikasi pewilayahan yang digunakan lebih banyak adalah *Homogeneous Region*, *Planning Region*, dan *Administrative Region*. Sementara pada konteks mikro, klasifikasi pewilayahan lebih banyak menggunakan *Nodal Region*. Namun demikian, pengklasifikasian wilayah yang merupakan representasi dari konsep ruang (*space*) dan lokasi (*location*) ini tidak bersifat mutlak, tapi dapat digabungkan atau disesuaikan dengan tujuan analisisnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, semakin jelas bahwa aspek ruang (*spasial*) sangat penting dijadikan dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan. Konsep ruang (*spasial*) ini sama pentingnya dengan dimensi waktu dalam ilmu ekonomi modern yang didekati dengan menggunakan variabel tingkat bunga, sementara dimensi spasial didekati dengan variabel berupa ongkos transportasi (*transportation cost*). Dengan memasukkan variabel-variabel spasial ini bukan saja konsep-konsep dalam ilmu ekonomi menjadi berkembang tetapi juga memberikan alternatif sudut pandang dalam identifikasi permasalahan maupun pemecahannya. Hal ini menjadi semakin relevan karena sesungguhnya kondisi geografis Indonesia penuh dengan permasalahan yang perlu segera diselesaikan.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan ruang (*space*) baik dalam pengertian sempit maupun luas?
- 2) Jelaskan definisi wilayah *homogeneous (uniform region)*, berikut contohnya!
- 3) Jelaskan definisi wilayah heterogen (*nodal region*) berikut contohnya!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Baca kembali konsepsi dan definisi tentang ruang (*space*). Temukan apa pemahaman ruang baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.
- 2) Baca kembali konsepsi dan definisi tentang wilayah berikut klasifikasinya menurut beberapa ahli.
- 3) Apabila Anda kembali membaca petunjuk pada poin 2, maka Anda akan dengan mudah menjawab soal latihan ini.



## **RANGKUMAN**

---

1. Ruang dapat dipahami dalam beberapa sudut pandang. Menurut Kamus Random House (Tarigan, 2009), ruang diartikan sebagai tempat berdimensi tiga tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat menampung benda dan kegiatan apa saja. Sementara menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang dimaknai sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dari definisi tersebut kemudian dapat kita pahami bahwa ada ruang yang dimaksudkan untuk manusia melakukan kegiatannya dan di sisi lain juga ada ruang untuk kelangsungan hidup makhluk lain yang juga harus dipelihara, dijaga dan bahkan dilindungi agar kehidupannya dapat tetap berlangsung.
2. Secara umum, analisis keruangan dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meliputi: *what*, struktur ruang itu seperti apa; *where*, dimana struktur ruang tersebut berada; *when*, kapan struktur ruang tersebut terbentuk seperti itu; *why*, mengapa struktur ruang terbentuk seperti itu; *how*, bagaimana proses terbentuknya struktur seperti itu; *who suffers what and who benefits what*, siapa yang menderita atau memperoleh keuntungan dari adanya struktur ruang seperti itu.
3. Konsepsi wilayah dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe dimana ide dasarnya terletak pada pemahaman bahwa terdapat hubungan yang mendasar dari tingkah-laku yang terjalin diantara bagian-bagian pembentuknya, yang bertolak pada konsepsi homogenitas dan heterogenitas. Di samping konsepsi homegenitas-heterogenitas tersebut, untuk menentukan batas-batas wilayah (demarkasi

wilayah) dapat juga dilakukan dengan penggabungan konsepsi-konsepsi tersebut. Itulah kenapa kemudian muncul klasifikasi wilayah yang disebut dengan wilayah perencanaan atau administrasi.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Yang dimaksudkan dengan wilayah formal (*formal region*) sebagaimana didefinisikan oleh Ishard adalah wilayah yang ....
  - A. mencakup tempat-tempat yang memiliki kesamaan karakteristik
  - B. menekankan kesamaan keterkaitan antar komponen atau lokasi/tempat
  - C. dibentuk berdasarkan keterkaitan sosial ekonominya yang erat baik antar-daerah dalam satu negara maupun antar daerah antar negara.
  - D. dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah
  
- 2) Yang dimaksudkan dengan wilayah fungsional (*functional region*) sebagaimana didefinisikan oleh Ishard adalah wilayah yang ....
  - A. mencakup tempat-tempat yang memiliki kesamaan karakteristik
  - B. menekankan kesamaan keterkaitan antar komponen atau lokasi/tempat
  - C. dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah
  - D. dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan
  
- 3) Yang dimaksudkan dengan wilayah perencanaan (*planning region*) adalah wilayah yang ....
  - A. mencakup tempat-tempat yang memiliki kesamaan karakteristik
  - B. menekankan kesamaan keterkaitan antar komponen atau lokasi/tempat
  - C. dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah
  - D. dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan
  
- 4) Yang dimaksudkan dengan wilayah administratif (*administrative region*) adalah wilayah yang ....

- A. mencakup tempat-tempat yang memiliki kesamaan karakteristik
  - B. menekankan kesamaan keterkaitan antar komponen atau lokasi/tempat
  - C. dibentuk untuk tujuan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah
  - D. dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan
- 5) Bila diperhatikan, dilihat dari definisinya, pengertian wilayah fungsional (*functional region*) sama pemahamannya dengan wilayah ....
- A. administratif
  - B. homogen
  - C. nodal
  - D. perencanaan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
 80 - 89% = baik  
 70 - 79% = cukup  
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 3**

## Pendekatan dan Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan berbagai penjelasan mengenai konsep keilmuan ekonomi wilayah dan kota, dan komponen-komponen dan karakteristik serta *positioning*nya dalam kerangka keilmuan ekonomi, maka selanjutnya penting dibahas mengenai pendekatan dan ruang lingkup yang digunakan dalam keilmuan ini.

### A. PENDEKATAN ILMU EKONOMI WILAYAH DAN KOTA

Dalam pemahaman yang sederhana, ilmu ekonomi wilayah dan kota didefinisikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang analisisnya ditekankan pada pengaruh aspek ruang (*spatial*) ke dalam analisis ekonomi dengan fokus pembahasan pada tingkat wilayah dan daerah perkotaan (Sjafrizal, 2012). Dengan demikian, terlihat bahwa ilmu ekonomi wilayah dan kota merupakan suatu bentuk pengembangan dari keilmuan ekonomi tradisional terkait dengan beberapa aspek tertentu yaitu aspek ruang (*spatial*) dan aspek lokasi (*location*) yang tidak ter-cover pembahasannya dalam ilmu ekonomi tradisional. Oleh karena aspek ruang ini selanjutnya dibahas secara khusus dalam teori lokasi, maka dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi wilayah dan kota pada prinsipnya merupakan gabungan antara ilmu ekonomi tradisional dan teori lokasi dan tata ruang. Dalam hal ini, subjek analisis dapat bersifat mikro maupun makro.

Sementara itu, pada konteks pemahaman yang lebih luas, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan untuk memahami ilmu ekonomi wilayah dan kota, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, ilmu ekonomi wilayah dan kota dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang terpisah, namun bersifat multidisipliner yaitu memiliki keterkaitan dengan beberapa disiplin ilmu yang lain seperti: geografi, ilmu ekonomi, ilmu lingkungan hidup, transportasi dan ilmu sosial. Di sini, ilmu ekonomi wilayah dan kota dipandang sebagai ilmu regional (*regional science*).

*Kedua*, ilmu ekonomi wilayah dan kota didefinisikan sebagai suatu ilmu yang membahas semua persoalan yang dihadapi oleh suatu wilayah dan kota tertentu dari sudut pandang ilmu ekonomi.

*Ketiga*, ilmu ekonomi wilayah dan kota, didefinisikan secara lebih komprehensif menuju pembentukan teori keseimbangan umum ruang (*spatial general equilibrium theory*). Di sini, ilmu ekonomi wilayah dan kota dipandang sebagai cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada aspek wilayah (*economics of spatial separation*).

Menurut Sjafrizal (2012), pembahasan materi dalam ilmu ekonomi wilayah dan kota sendiri sebenarnya lebih fokus pada proses menganalisis atau mengkaji persoalan-persoalan yang dihadapi oleh suatu wilayah atau daerah perkotaan sehingga dapat diperoleh suatu bentuk penyelesaian masalah (*problem solving*) yang efektif dan efisien. Jadi sesungguhnya, keilmuan ini tidak diarahkan pada upaya pengembangan ilmu ekonomi secara murni yang sering kali lebih bersifat teoritis dan konseptual namun kearah yang lebih bersifat *solutif* dan peka terhadap persoalan yang ada pada konteks pembangunan wilayah dan kota.

## **B. SIFAT ILMU EKONOMI WILAYAH DAN KOTA**

Oleh karena fokus dan orientasi keilmuan ini adalah untuk menghasilkan atau memformulasikan berbagai bentuk penyelesaian persoalan yang terjadi pada skala wilayah dan perkotaan, maka sangatlah logik bila keilmuan ini bersifat multidisipliner, atau memiliki keterkaitan dengan beberapa disiplin ilmu lain seperti geografi, sosiologi, ilmu lingkungan, arsitektur, teknik sipil, perencanaan transportasi, geologi, planologi, geodesi, hukum, administratif, dan lain-lain. Keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu ini disebabkan oleh karena karakteristik wilayah dan perkotaan yang syarat dengan berbagai persoalan dibanyak bidang atau aspek. Oleh karenanya tidak mengherankan bila cakupan analisis dalam ilmu ekonomi wilayah dan kota cenderung menjadi sangat luas tergantung dari permasalahan yang dihadapi oleh suatu wilayah atau kota tertentu. Selain itu, agar implementasi Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota dalam menyelesaikan berbagai persoalan wilayah dan kota berjalan secara optimal maka dalam penerapannya harus terintegrasi (*intergrated*) dengan berbagai disiplin ilmu yang terkait tersebut, bukan terpisah-pisah.



Karena sifatnya yang multidisiplin ini, maka tidak mungkin dalam pengembangan keilmuan ekonomi wilayah dan kota ini hanya menggunakan satu pendekatan ilmu atau metode saja. Disamping itu, kenyataannya bahwa setiap wilayah dan daerah perkotaan memiliki karakteristik yang tidak sama, sehingga kejelian dan kemampuan intuisi para pelaku perencana wilayah dan kota harus mampu mengkombinasikan berbagai pendekatan ilmu yang ada. Hal ini penting mengingat memang “*there is no one size fits all*” dalam konteks penyelesaian persoalan yang ada. Adapun bermacam persoalan yang dapat muncul pada konteks wilayah maupun perkotaan antara lain pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali, distribusi pendapatan yang tidak merata, terbatasnya penyediaan barang-barang publik, masalah pengangguran, ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi, tingkat kriminalitas yang tinggi, kesemrawutan tata ruang. Berbagai masalah ini akan semakin parah jika campur tangan pemerintah dikurangi atau hilang sama sekali.

## **B. ASUMSI UMUM DALAM ILMU EKONOMI WILAYAH DAN KOTA**

Sama halnya dengan ilmu ekonomi tradisional, ilmu ekonomi wilayah dan kota juga menggunakan berbagai asumsi dalam proses analisisnya. Terdapat beberapa alasan mengenai perlunya penggunaan asumsi dalam ilmu ekonomi wilayah dan kota, yaitu: *Pertama*, penggunaan asumsi diperlukan untuk menyederhanakan (*simplifikasi*) proses analisis yang kompleks menjadi sederhana; *Kedua*, penggunaan asumsi ini dimaksudkan untuk menunjukkan prasyarat kondisi (*conditional situation*) dimana sebuah teori dapat berlaku atau diterapkan; *Ketiga*, sebagai ilmu sosial, dalam ilmu ekonomi wilayah dan kota, objek analisisnya biasanya tidak bisa dikontrol atau dikendalikan sebagaimana halnya dalam analisis ilmu eksakta.

Safrizal (2012), di dalam bukunya menjelaskan secara detail mengenai perlunya memperhatikan asumsi yang mendasari sebuah teori yaitu pada kondisi bagaimana analisis teori tersebut berlaku. Hal ini penting mengingat, dalam beberapa praktik, kadang beberapa kalangan menggunakan konsep teori tersebut pada kondisi yang kurang tepat, sehingga proses analisisnya tidak dapat menghasilkan formulasi kesimpulan yang tepat dan dapat dimengerti. Sebagai akibatnya, banyak kalangan lantas menganggap bahwa teori tidak sama dengan praktik, sehingga mereka kurang suka menggunakan

teori saat menganalisis dan melaksanakan kegiatannya. Hal ini tentunya tidak benar, mengingat pada hakikatnya teori lahir dari berbagai kesimpulan terhadap praktik-praktik yang terjadi dalam masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan asumsi dalam melakukan analisis: *Pertama*, asumsi *Ceteris Paribus* (*other things being equal*), artinya berlaku pada kondisi dimana faktor dan unsur lain tetap atau tidak berubah. Beberapa contoh penerapan asumsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam ilmu ekonomi tradisional, hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta (*demand*) akan berbanding terbalik dengan tingkat harga (*price*) barang. Artinya, kenaikan harga barang akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diminta. Logikanya, kenaikan harga akan menyebabkan turunnya daya beli konsumen dan akan berakibat pada berkurangnya jumlah permintaan. Selain itu, naiknya harga barang juga akan menyebabkan konsumen mencari barang pengganti (*substitusi*) yang harganya lebih murah. Teori “hukum permintaan” ini berlaku pada kondisi *Ceteris Paribus* dimana beberapa unsur tertentu dianggap tidak berubah, misalnya faktor selera (*taste*) dan harapan masyarakat (*expectation*). Pada praktiknya, kedua faktor ini, baik selera maupun harapan masyarakat, sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang sehingga seharusnya tetap diperhitungkan. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, beberapa variabel yang mempengaruhi semacam ini sulit untuk diukur secara kuantitatif, maka untuk mengurangi komplikasi proses analisisnya, beberapa variabel seperti ini dianggap tetap atau tidak berubah.
2. Everett dan Ebert (1992:5), mendefinisikan fungsi produksi sebagai suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang, mengubah sesuatu yang nilainya lebih rendah menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dengan menggunakan sumberdaya yang ada sehingga produk yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan pada konsumen. Dalam beberapa hal, pembahasan mengenai fungsi produksi ini sering kali hanya menggunakan dua variabel penentu, yaitu modal (*capital*), disimbolkan dengan *K*, dan tenaga kerja (*labor*), disimbolkan dengan *L*. Pada kondisi *Ceteris Paribus*, maka diasumsikan bahwa variabel-variabel lain dianggap tetap. Beberapa variabel yang dianggap tidak berubah tersebut antara lain yaitu tanah (*land*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Asumsi bahwa tanah tidak berubah sebenarnya

cukup beralasan mengingat luasan tanah memang jarang sekali berubah kecuali terjadi *force majeure* keadaan yang luar biasa dikarenakan fenomena alam. Namun demikian, untuk menganggap bahwa variabel kewirausahaan tidak mengalami perubahan sepertinya kurang realistis mengingat dewasa ini perkembangan bidang kewirausahaan terlihat sangat dinamis karena berbagai kebijakan dibuat untuk mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Namun demikian, penggunaan asumsi ini terpaksa harus ditempuh mengingat pengukuran variabel tingkat kewirausahaan tidak mudah dilakukan.

*Kedua*, penggunaan asumsi dalam analisis ilmu ekonomi wilayah dan kota, namun tidak terdapat dalam ilmu ekonomi tradisional misalnya adalah asumsi terkait dengan ruang satu dimensi (*linear space*) dalam analisis teori lokasi. Dalam kenyataan, asumsi tersebut tentunya tidak realistis mengingat ruang memiliki beberapa dimensi (*nonlinear space*), namun demikian penggunaan asumsi satu dimensi ruang ini dimaksudkan untuk mempermudah proses analisis. Demikian pula halnya dengan penggunaan asumsi *monocentric city* yaitu kota dengan satu pusat yang dalam kenyataan tidak selalu benar karena sejalan dengan perkembangan berbagai aktivitas perkotaan, saat ini banyak kota yang memiliki pusat lebih dari satu (*multicentric city*). Selain itu, juga seringkali digunakan asumsi besaran ongkos transportasi yang dianggap tetap (*fixed rate of transportation cost*), yang pada kenyataannya asumsi ini tidak selalu demikian mengingat seringkali terjadi kenaikan ongkos transportasi bila jarak yang ditempuh semakin jauh (*economies of long haul*).



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota!
- 2) Jelaskan mengapa Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota dikatakan sebagai *multidisipliner*!
- 3) Sebutkan dan jelaskan asumsi-asumsi yang digunakan dalam Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota!

### ***Petunjuk Jawaban Latihan***

- 1) Baca kembali pendekatan ilmu ekonomi wilayah dan kota. Temukan pemahaman dalam masing-masing pendekatan tersebut.
- 2) Baca kembali disiplin keilmuan yang terkait dengan ilmu ekonomi wilayah dan kota dan pahami bagaimana masing-masing disiplin ilmu tersebut berkontribusi dalam menjawab atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi baik pada konteks wilayah maupun perkotaan.
- 3) Apabila Anda kembali membaca petunjuk pada poin 2, maka Anda akan dengan mudah menjawab soal latihan ini.



### **RANGKUMAN**

---

1. Ilmu ekonomi wilayah dan kota merupakan suatu bentuk pengembangan dari keilmuan ekonomi tradisional terkait dengan beberapa aspek tertentu yaitu aspek ruang (*spatial*) dan aspek lokasi (*location*) yang tidak ter-cover pembahasannya dalam ilmu ekonomi tradisional.
2. Karena aspek ruang dibahas secara khusus dalam teori lokasi, maka dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi wilayah dan kota pada prinsipnya merupakan gabungan antara ilmu ekonomi tradisional dan teori lokasi dan tata ruang.
3. Ilmu ekonomi wilayah dan kota dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang terpisah, namun bersifat multidisipliner yaitu memiliki keterkaitan dengan beberapa disiplin ilmu yang lain, seperti: geografi, ilmu ekonomi, ilmu lingkungan hidup, transportasi dan ilmu sosial.
4. Ilmu ekonomi wilayah dan kota tidak diarahkan pada upaya pengembangan ilmu ekonomi secara murni yang sering kali lebih bersifat teoritis dan konseptual namun kearah yang lebih bersifat *solutif* dan peka terhadap persoalan yang ada pada konteks pembangunan wilayah dan kota.
5. Sama halnya dengan ilmu ekonomi tradisional, ilmu ekonomi wilayah dan kota juga menggunakan berbagai asumsi dalam proses analisisnya. Beberapa asumsi yang digunakan dalam ilmu ekonomi wilayah dan kota antara lain: *Ceteris Paribus* (*other things being equal*), artinya berlaku pada kondisi dimana faktor dan unsur lain tetap atau tidak berubah; asumsi *linear space* dalam analisis teori lokasi, asumsi *monocentric city* yaitu kota dengan satu pusat, dan asumsi besaran ongkos transportasi yang dianggap tetap (*fixed rate of transportation cost*).

**TES FORMATIF 3**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam kaitan antara ilmu ekonomi wilayah dan kota dengan ilmu ekonomi tradisional, dari pernyataan berikut yang BENAR adalah ....
  - A. Sama halnya dengan ilmu ekonomi wilayah dan kota, ilmu ekonomi tradisional juga telah memasukkan aspek ruang (*spatial*) dan aspek lokasi (*location*) dalam analisisnya.
  - B. Ilmu ekonomi tradisional pada prinsipnya merupakan gabungan antara ilmu ekonomi wilayah dan kota dan teori lokasi dan tata ruang.
  - C. Ilmu ekonomi wilayah dan kota merupakan pengembangan dari keilmuan ekonomi tradisional yang memasukkan aspek ruang (*spatial*) dan aspek lokasi (*location*) yang tidak ter-cover pembahasannya dalam ilmu ekonomi tradisional.
  - D. Kedua keilmuan ini tidak ada hubungan satu dengan yang lain dan masing-masing mengembangkan konsep dan teorinya sendiri-sendiri.
  
- 2) Dikatakan bahwa ilmu ekonomi wilayah dan kota tidak dimaksudkan untuk pengembangan keilmuan murni tetapi kearah keilmuan yang solutif. Yang dimaksud solutif adalah karena ilmu ekonomi wilayah dan kota ....
  - A. dikembangkan ke arah teoritis
  - B. dikembangkan ke arah konseptual.
  - C. dikembangkan kearah penyelesaian persoalan yang ada pada konteks wilayah dan perkotaan
  - D. melibatkan berbagai disiplin ilmu yang lain.
  
- 3) Asumsi-asumsi berikut ini adalah asumsi yang digunakan dalam Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota yang juga ada dalam Ilmu Ekonomi Tradisional atau Klasik, yaitu ....
  - A. *Ceteris Paribus*
  - B. *Linier Space*
  - C. *Monocentric City*
  - D. *Fixed Rate of Transportation Cost*

- 4) Berikut ini adalah tujuan penggunaan asumsi dalam proses analisis, *kecuali* untuk ...
- menyederhanakan (simplifikasi) proses analisis yang kompleks menjadi sederhana
  - menunjukkan prasyarat kondisi (*conditional situation*) dimana sebuah teori dapat berlaku atau diterapkan
  - membatasi objek analisis yang biasanya tidak bisa dikontrol atau dikendalikan
  - membuat proses analisis menjadi terlihat kompleks
- 5) Salah satu asumsi yang digunakan dalam analisis Ilmu Ekonomi Wilayah dan Kota adalah asumsi *fixed rate of transportation cost*, yang dimaksud adalah ....
- berlaku pada kondisi dimana faktor dan unsur lain tetap atau tidak berubah
  - ruang dianggap sebagai satu dimensi dan membuat ongkos transportasi menjadi tidak tetap
  - dimanapun berada, besaran ongkos transportasi dianggap tetap
  - kota dianggap memiliki satu pusat pelayanan dimana ongkos transportasi yang diperlukan dari dan ke pusat pelayanan ini dianggap selalu berubah-ubah berdasarkan jarak

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) D
- 2) A
- 3) C
- 4) C
- 5) A

### *Tes Formatif 2*

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D
- 5) C

### *Tes Formatif 3*

- 1) C
- 2) C
- 3) A
- 4) D
- 5) C

## Daftar Pustaka

- Rahardjo, Adisasmita. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Kota*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. 2012. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Tarigan, Robinson. 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Akson.
- Wibowo, Rudi dan Soetriono. 2004. *Konsep, Teori, dan Landasan Analisis Wilayah*. Malang: Bayu Media.
- Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.*